



Perubahan Perilaku Masyarakat Setelah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Siti Khadijah¹, Marisa Elsera^{2*}

Universitas Maritim Raja Ali Haji

sitikhadijah658@gmail.com¹, marisaelsera@umrah.ac.id²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

History of the article :

Received 19 November 2024

Revised 23 December 2024

Publish 30 December 2024

Keywords:

Perubahan; pemukiman kumuh, sampah; program; pesisir

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap program pemerintah mengatasi pemukiman kumuh di Kota Tanjungpinang. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bertujuan untuk mengatasi kumuh tanpa menggesur. Penelitian ini menggunakan teori behaviorisme sosiologi dari B. F. Skinner tentang perilaku masyarakat berdasarkan lingkungannya. dan tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, program Kotaku di Kampung Bugis tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga kebiasaan masyarakat membuang sampah di laut tetap dilakukan meskipun program ini telah ada sejak 2016. Sementara itu, untuk Program Kotaku di Senggarang dan Tanjung Unggat telah ada penanganan sampah dengan memasang jaring agar sampah tidak sampai ke permukiman warga. Namun ketiga daerah itu menunjukkan tidak belum cukup berhasil program Kotaku di Tanjungpinang.

PENDAHULUAN

Daerah pesisir dan daerah urban rentan dengan persoalan masalah lingkungan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup di daerah pesisir adalah permasalahan pemukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni, ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas sarana serta prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman, 2011). Kondisi ini mencerminkan lingkungan yang buruk dan sering kali menjadi tempat bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang menjadi salah satu kota tujuan kaum urban di Provinsi Kepulauan Riau selain Kota Batam. Terdapat beberapa daerah slum area/pemukiman kumuh di Tanjungpinang. Berdasarkan Surat Keterangan Walikota Tanjungpinang No. 337 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang, ditetapkan 7 lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Lokasi tersebut diantaranya, Pantai Impian Kelurahan Kampung Baru (luas 12Ha), lembah purnama Kelurahan Tanjung Ayun Sakti (Luas 5,99 Ha), Sungai Nibung Angus, Kelurahan Tanjungpinang Timur (14,6Ha), Tanjung Unggat Kelurahan Tanjung Unggat (31,64Ha), Pelantar Sulawesi, Kelurahan Tanjungpinang Kota (51,8Ha), Kampung Bugis (18,92 Ha) dan Senggarang (14,81 Ha).

Pemukiman kumuh di atas umumnya adalah daerah pesisir, yakni daerah atau wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Pada daerah-daerah pesisir ini terlihat tumpukan sampah. Limbah di daerah pantai kini menjadi sebuah masalah serius. Banyak sampah plastik terbawa oleh arus laut menuju daratan. Penduduk asli terkadang membuang sampah mereka langsung ke laut. Akumulasi sampah ini mencemari habitat laut dan pesisir. Kurangnya kesadaran masyarakat memperburuk penumpukan sampah. Kebiasaan membuang sampah ke laut merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Pelaku penyimpangan biasanya tidak dilakukan oleh individu melainkan akan membentuk subkultur menyimpang, yakni kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki norma, nilai, dan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial yang dianut secara umum (Elsara, 2017).

Pemerintah telah berupaya memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah. Namun, aplikasi kebijakan ini masih belum sepenuhnya efektif. Organisasi lingkungan aktif membersihkan sampah di pantai. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ini masih terbatas. Kondisi ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk solusi jangka panjang. Penanganan sampah yang baik dapat menyelamatkan ekosistem pesisir dari kerusakan yang lebih parah. Disamping itu, faktor alam juga menyumbang penumpukan sampah di wilayah pesisir. Ketika air laut pasang, sampah yang berasal dari daerah lain akan hanyut. Namun ketika air laut surut, sampah akan tertinggal/tersangkut di daerah pesisir. Maka fenomena inilah yang sering terjadi di Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi yang merupakan daerah pulau.

Salah satu daerah paling banyak tumpukan sampah yakni Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan berita dari www.rri.co.id, terdapat sebanyak 2 Ton sampah berhasil dikumpulkan dari Kampung Bugis pada kegiatan World Cleanup Day (WCD) 21 September 2024. (Pertiwi, 2024). Selain kampung bugis, daerah pemukiman kumuh lainnya juga menyumbang sampah terbanyak. Data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyatakan tumpukan sampah nonorganik di sejumlah pesisir daerah itu diperkirakan mencapai 3,5 meter per tahunnya. (Panama, 2021).

Kondisi permukiman kumuh berdampak pada kesehatan masyarakat. Kondisi kumuhnya lingkungan tempat tinggal banyak menimbulkan berbagai penyakit tanpa masyarakat sadari sehingga mengganggu kesehatan karena sampah tersebut mengandung berbagai bakteri dan virus. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat penyakit yang diderita oleh masyarakat berhubungan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan masyarakat, seperti infeksi pernafasan atas dan infeksi pada kulit. Penyakit-penyakit tersebut berasal dari kurang terjaganya kualitas udara dan lingkungan sekitar. Berdasarkan permasalahan tersebut Kampung Bugis menjadi kelurahan sasaran pengentasan kekumuhan di Kota Tanjungpinang sesuai dengan SK Permukiman Kumuh dan Indikator Kumuh tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan bagaimana upaya untuk mengurangi angka permukiman kumuh yang ada di Tanjungpinang dengan menjalankan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Program ini lanjutan dari program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) yang dahulunya bernama P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman). Salah satu kegiatan dalam program Kotaku adalah pengelolaan sampah dan sistem kebun bersama (Rahajuni et al., 2020), pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat (SPALD-T) skala permukiman (Oktiawan et al., 2018), program pembangunan jembatan lingkar, program pengecatan rumah-rumah warga, dan program bak sampah keliling.

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai program Kotaku menemukan kegagalan merubah perilaku masyarakat dan minimnya partisipasi masyarakat mendukung program Kotaku (Wastiti et al., 2018) faktor utama penghambat partisipasi masyarakat adalah kondisi ekonomi. Masyarakat juga tidak bisa memberi sumbangan dana untuk Program Kotaku karena rendahnya penghasilan. (Purwanti, 2022) juga menemukan kurangnya partisipasi disebabkan oleh kurang populernya program Kotaku di masyarakat serta masih ada masyarakat yang sulit merubah kebiasaan membuang sampah sembarangan. (Robichin et al., 2019)

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak permukiman kumuh di kawasan pesisir Kelurahan Tallo, yaitu faktor lingkungan, faktor sosial dan faktor ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program seperti pengambilan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dengan menyumbangkan tenaga kerja dan material menjadi penentu keberhasilan program Kotaku (Lutfiah & Solahudin, 2021). Penelitian terdahulu (Efendi & Prastiyo, 2020) di Kelurahan Kamboja Kota Tanjungpinang, telah menemukan hasil bahwa tidak semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi dan tidak semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kampung Bugis, Senggarang dan Tanjungungat setelah dilaksanakannya program Kotaku di Tanjungpinang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Afrizal, 2014) mengatakan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena peneliti menganggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Peneliti dalam penelitian ini akan memberikan gambaran sesuai sistematika, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian ini yaitu kota tanpa kumuh studi pada masyarakat Kampung Bugis dengan mencari dan menemukan data secara langsung pada informan yang dianggap berkompeten dan mampu menjelaskan permasalahan yang ada.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni dimana penulis telah menetapkan kriteria informan sebagai berikut: masyarakat wilayah kumuh yakni Kampung Bugis, Senggarang dan Tanjungungat. Data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Data Primer didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang Informan. Observasi dilakukan dengan melihat partisipasi masyarakat dalam program Kotaku untuk mendapatkan data mengenai perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah dilaksanakan program tersebut.. Sementara itu data sekunder diperoleh dari dokumentasi (buku, jurnal, situs internet). Adapun analisis data dilakukan melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman A.M, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki indikator dan parameter dalam menentukan wilayah kumuh. Indikator tersebut dapat dilihat dari 7 kriteria, yakni Pertama, keteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan.. Kedua, aksesibilitas bangunan. Ketiga, pelayanan air minum/baku. Keempat, drainase lingkungan. Kelima, pengelolaan air limbah, Keenam, pengelolaan sampah. Ketujuh, penanganan bahaya kebakaran. Ketujuh kriteria ini kemudian dikembangkan ke dalam beberapa parameter yang kemudian memunculkan hasil wilayah kumuh.

1. Program Kota Tanpa Kumuh di Tanjungpinang

Wilayah kumuh ditetapkan sebanyak 57 titik lokasi berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sebelumnya juga telah dikeluarkan Keputusan Walikota pada tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi dan Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang. Guna menyelesaikan persoalan wilayah kumuh ini, maka pemerintah melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan tentang bagaimana pemahaman masyarakat terkait program Kota Tanpa Kumuh. Dari total informan yang berjumlah 8 orang, 25% informan tidak mengetahui tentang Program Kota Tanpa Kumuh yang ada di Kampung Bugis, padahal masyarakat tersebut merupakan warga yang sudah tinggal di Kampung Bugis kurang lebih selama 10 tahun dan Program Kota Tanpa Kumuh

ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 di Kampung Bugis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat mengetahui tentang Program Kota Tanpa Kumuh tersebut di Kampung Bugis namun hanya tahu bahwa ada Program tersebut di Kampung Bugis tanpa ikut berperan langsung terhadap program tersebut.

Jika merujuk pada petunjuk pelaksanaan program Kotaku, masyarakat mempunyai peran dan tanggungjawab dalam hal penyelenggaraan penanganan kumuh di kawasan permukiman kumuh, pelaksanaan dalam hal pembangunan yang bersifat komprehensif di segala bidang (tridaya), ikut serta dalam hal bertanggung jawab melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur dan sistem yang sudah dibangun dibantu dengan tim fasilitator untuk melakukan integrasi perencanaan di tingkat masyarakat dengan tingkat kabupaten/kota.

Ditetapkannya Kelurahan Kampung Bugis sebagai lokasi program Kota Tanpa Kumuh membawa kabar baik bagi masyarakat Kampung Bugis. Masyarakatpun merasa pemerintah memperhatikan mereka dengan harapan program ini akan menyelesaikan masalah kekumuhan yang ada di Kelurahan Kampung Bugis, serta hal ini dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan Kampung Bugis kepada masyarakat luar.

Adanya fasilitas yang dibangun menimbulkan dampak dalam berbagai bidang bagi masyarakat di Kampung Bugis. Adapun dampak dalam bidang sosial dan ekonomi yaitu adanya bak sampah keliling yang mengangkut sampah dari rumah-rumah warga Kampung Bugis. Selain itu, adanya peningkatan kepercayaan diri dari masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni dari Program Kotaku ini. Dampak lainnya yaitu adanya peningkatan perekonomian masyarakat setempat karena pembangunan fasilitas yang ada di Kampung Bugis melibatkan warga sekitar dan juga pengecatan rumah-rumah warga dan pembangunan jembatan lingkaran membuat daya tarik tersendiri untuk Kampung Bugis sehingga masyarakat luar tertarik untuk datang ke Kampung Bugis.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan sebagian masyarakat masih enggan untuk membuang sampah di tempat sampah. Tak dapat dipungkiri masih ada saja yang membuang sampah di laut walaupun sudah ada himbauan dan undang-undang yang mengatur. Sanksi sosial terhadap warga yang masih membuang sampah dilaut belum ada, jika ada warga yang membuang sampah dilaut itu hanya dibiarkan saja dengan alasan tidak ingin mencampuri urusan orang lain dan merasa tidak memiliki kewenangan untuk menegur. Menurut keterangan salah satu RT di Kampung Bugis, ketika melihat ada warganya yang membuang sampah di laut akan mendapatkan teguran, tetapi hal tersebut tidak dapat dipantau secara berkala karena mungkin saja warga tersebut membuang sampah pada saat keadaan sepi atau pada malam hari.

Permasalahan sampah yang ada di Kampung Bugis bukan hanya berasal dari masyarakat itu sendiri tetapi juga sampah kiriman yang berasal dari luar Kampung Bugis. Adanya penumpukan sampah tersebut dapat menimbulkan kekumuhan yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Kekumuhan indetik dengan kemiskinan dan kemiskinan merupakan masalah sosial yang dapat menimbulkan permasalahan lain seperti pengangguran, tindak kriminal, tingkat pendidikan rendah dan lain-lain.

Kebiasaan Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pola kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tindakan membuang sampah sembarangan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di laut saja namun juga dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dilihat dari bagaimana kondisi kebersihan lingkungan pesisir pantai.

Permukiman kumuh yang ada di Kampung Bugis muncul dari pola kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya, seperti membuang sampah di sembarang tempat bahkan

warga bersikap acuh jika ada organisasi sosial yang mengadakan bakti sosial membersihkan lingkungan. Sampah yang ada di lingkungan masyarakat tidak hanya berasal dari lingkungan tersebut namun juga berasal dari daerah lain karena laut yang bersifat terbuka sehingga sampah yang berasal dari daerah lain akan tertinggal di Kampung Bugis sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di pesisir pantai atau pun pondasi rumah masyarakat.

Sebagian besar Masyarakat Kampung Bugis bertempat tinggal di kawasan pesisir sehingga membuat masyarakat terbiasa untuk membuang sampah di laut, masyarakat pesisir identik dengan kekumuhan karena masyarakat menganggap laut itu terbuka sehingga mereka bebas untuk membuang sampah di laut. Perilaku membuang sampah sembarangan juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat Kampung Bugis.

Permukiman kumuh identik dengan permukiman padat penduduk yang tidak memenuhi standar. Standar tersebut meliputi ketersediaan air bersih, ruang terbuka publik, sanitasi, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Kondisi lingkungan di permukiman masyarakat kumuh dapat menimbulkan infeksi pada kulit disebabkan karena kualitas fisik dan kimia dari suatu rumah seperti kelembaban, pencahayaan, dan suhu yang buruk dapat meningkatkan virus dan kuman penyebab penyakit berkembang pesat sehingga dapat meningkatkan berkembangnya penyakit infeksi pada kulit.

Perubahan Sosial Setelah Adanya Program Kota Tanpa Kumuh

Perubahan sosial sering terjadi sebagai hasil dari perkembangan atau evolusi yang menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Durkheim melihat perubahan sosial sebagai pergeseran dalam cara masyarakat berfungsi, terutama terkait dengan perbedaan fungsi-fungsi individu dan lembaga. Perubahan sosial merupakan transformasi dari pola hubungan dalam masyarakat dan struktur sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana masyarakat mengalami pergeseran dalam tatanan sosialnya, baik itu dalam hal norma, nilai, institusi, maupun interaksi sosial antar anggota masyarakat. Durkheim melihat perubahan sosial sebagai proses yang alami dan tak terelakkan dalam perkembangan masyarakat. (Martono, 2014)

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa perubahan di Kampung Bugis dapat dilihat dari infrastruktur setelah adanya Program Kota Tanpa Kumuh. Perbedaan ini sangat jelas dirasakan oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya infrastruktur yang berdiri contohnya jembatan lingkar yang dimana berfungsi sebagai jalur evakuasi. Contohnya seperti saat terjadi kebakaran di suatu rumah, dengan adanya jembatan lingkar tersebut akses untuk menuju lokasi kebakaran dapat diakses dari banyak titik. Selain itu, jembatan lingkar juga berfungsi sebagai pembatas dari pembangunan rumah masyarakat sehingga rumah masyarakat di Kampung Bugis lebih tertata rapi serta dapat digunakan sebagai destinasi wisata baru bagi Masyarakat Kampung Bugis maupun Tanjungpinang.

Pengecetan rumah masyarakat yang disebut dengan Desa Pelangi Kampung Bugis yang dimana bertujuan untuk memperindah lingkungan tempat tinggal bagi Masyarakat Kampung Bugis. Pelebaran jalan dan semenisasi juga dilakukan di pelantar-pelantar yang ada di Kampung Bugis sehingga mempermudah akses untuk mobilisasi masyarakat Kampung Bugis, seperti ketika ada salah satu anggota masyarakat yang sakit dan harus dijemput oleh mobil ambulance tidak terjadi kesulitan karena lebar jalan yang sudah memadai. Dampak positif lain dari adanya pembangunan jembatan lingkar yaitu sebagai destinasi wisata baru yang membawa perubahan ekonomi di Masyarakat Kampung Bugis, karena dengan adanya jembatan lingkar dapat menarik perhatian masyarakat baik Masyarakat Kampung Bugis maupun Masyarakat Tanjungpinang berkunjung ke Kampung Bugis sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Bugis.

Di sisi lain keberadaan tempat sampah yang disediakan di setiap rumah membuktikan bahwa adanya keseriusan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Dalam penelitian yang telah dilakukan di Kampung Bugis menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum

menyediakan tempat sampah dirumahnya dan juga keberadaan tempat sampah pada tempat umum di Kampung Bugis sangat sulit untuk ditemukan karena sebagai tempat sampah sudah hilang dan hanya menyisakan kerangkanya saja. Contohnya di Jembatan Lingkar banyak titik tempat sampah yang sudah tidak ada tempat sampahnya lagi.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan sampah yang ada di Kampung Bugis, pemerintah mengambil langkah dengan menyediakan bak sampah keliling yang bertujuan untuk mengangkut sampah di permukiman Masyarakat Kampung Bugis, bak sampah keliling ini beroperasi dari tahun 2019-2020. Berhentinya pengoperasian bak sampah keliling disebabkan karena tidak adanya biaya operasional dari bak sampah tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang menolak untuk membayarkan iuran sampah sebesar Rp. 10.000,00 setiap bulannya. Bak sampah keliling tersebut dioperasikan swadaya dari masyarakat sehingga iuran yang di dapatkan dari masyarakat yang menjadi biaya operasional dari bak sampah keliling tersebut.

Perubahan masyarakat dari segi sosial, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat membuang sampah di laut yang sudah tertanam kuat sejak lama, sehingga kebiasaan tersebut sulit untuk diubah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah kebiasaan tersebut. Ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Bugis cenderung rendah sehingga pola pikir masyarakat tentang kesadaran lingkungan masih sangat rendah. Papan himbauan dan larangan untuk tidak membuang sampah di Kampung Bugis itu sendiri tersebar di beberapa titik, namun masyarakat bersikap tidak peduli terhadap larangan tersebut dan juga dari segi pemerintah belum bertindak tegas dengan menerapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan denda administrasi paling banyak Rp. 25.000.000,00 (berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Pasal 24 Ayat 1 dan 2).

Mekanisme kontrol dan sanksi sosial yang belum terbentuk di Masyarakat Kampung Bugis menyebabkan perilaku membuang sampah sembarangan di laut masih dianggap sebagai perilaku yang wajar. Belum adanya individu atau kelompok masyarakat di Kampung Bugis yang mampu menggerakkan atau memiliki inisiatif untuk memotivasi warga dalam merubah sikap untuk menjaga kebersihan lingkungan. Belum adanya upaya pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak terkait dan juga tidak adanya evaluasi terhadap perkembangan masyarakat setelah adanya program Kotaku berakibat pada tidak berjalannya upaya perubahan perilaku masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan sekitar.

Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap Program Kotaku di Kota Tanjungpinang, salah satu titiknya adalah di Kotaku Tanjung Unggat dan di Kotaku Senggarang. Jika dilihat dari Program Kota Tanpa Kumuh yang ada di Tanjung Unggat, terdapat beberapa perubahan fisik infrastruktur bangunan seperti dibangunnya jembatan pelangi, semenisasi jembatan, dan pembangunan ruang terbuka publik dan sama halnya dengan Kota Tanpa Kumuh di Senggarang, namun ada perbedaan dari pembangunan jembatan yang ada di Senggarang dan Tanjung Unggat karena sebagian jembatan dipasang jaring-jaring agar sampah yang berasal dari luar tidak mencapai permukiman penduduk.

Perubahan dari sisi sosial, karakteristik masyarakat Kampung Bugis, Tanjung Unggat, dan Senggarang memiliki karakter yang hampir sama yaitu tentang pola kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di laut, masyarakat cenderung tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar permukiman penduduk, hal ini dibuktikan dengan adanya timbunan sampah diantara permukiman penduduk dan juga di kolong-kolong rumah masyarakat. Timbunan sampah yang ada di sekitar permukiman masyarakat tidak hanya berasal dari pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga sampah yang hanyut dan tertambat di permukiman tersebut. Masyarakat Kampung Bugis, Senggarang dan Tanjung Unggat enggan untuk membersihkan kolong rumah dengan anggapan jika sampah tersebut dibersihkan, dalam jangka waktu singkat akan penuh kembali. Walaupun sudah dipasang jaring-jaring agar sampah tidak

mencapai permukiman masyarakat, hal tersebut tidak berfungsi dengan semestinya karena masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan di laut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebiasaan masyarakat merupakan segala hal yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan diwariskan secara turun temurun sehingga membentuk pola tingkah laku tertentu yang mencirikan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk merubah sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini juga terjadi di Masyarakat Kampung Bugis, dimana Masyarakat Kampung Bugis yang sudah terbiasa membuang sampah di laut di ubah dengan pola membuang sampah pada tempatnya atau pada bak-bak penampungan sampah. Jika dilihat secara fisik, Kampung Bugis mengalami perubahan yang signifikan namun perubahan itu tidak terjadi secara sosial, karena dalam hal menjaga lingkungan masyarakat masih tergolong acuh dan belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, tidak adanya kontrol dan sanksi sosial di Masyarakat Kampung Bugis sehingga perilaku masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembarangan dilaut masih dianggap perilaku yang wajar dan belum adanya inisiatif baik dari segi individu maupun kelompok untuk tetap menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar yang tentu saja berdampak untuk Masyarakat Kampung Bugis secara langsung maupun tidak langsung.

REFERENSI

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi 3, Vol. 1). Raja Grafindo.
- Efendi, D., & Prastiyo, E. B. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kemboja Kota Tanjung Pinang). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 41–47. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3090>
- Elsera, M. (2017). *Perilaku Menyimpang* (1st ed., Vol. 1). UMRAH PRESS.
- Keputusan Walikota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (2023).
- Lutfiah, S., & Solahudin, D. (2021). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(3). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/view/24233>
- Martono, N. (2014). *Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial* (Vol. 1). RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Oktiawan, W., Hardyanti, N., & Damayanti, P. (2018). Master Plan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sukoharjo. 15(2).
- Panama, N. (2021, October 28). DLH: tumpukan sampah pesisir Tanjungpinang capai ketebalan 3,5 meter. ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/2486893/dlh-tumpukan-sampah-pesisir-tanjungpinang-capai-ketebalan-35-meter>
- Purwanti, T. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (Studi Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 623–632–623–632. <https://doi.org/10.37676/PROFESSIONAL.V9I2.3643>
- Rahajuni, D., Badriah, L. S., Tini, E. W., & Lestari, S. (2020). Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh Melalui Sistem Kebun Bersama. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 163–171. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JPPM/article/view/5584>
- Robichin, M. A., Tamsil, A., & Hadijah, S. (2019). Analisis Dampak Permukiman Kumuh Terhadap Kawasan Pesisir Kelurahan Tallo. *Journal of Indonesia Tropical Fisheries (JOINT-*

- FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap Dan Ilmu Kelautan, 2(1), 111–123. <https://doi.org/10.33096/JOINT-FISH.V2I1.42>
- Pertiwi, R. (2024). WCD Tanjungpinang Kumpulkan Lebih Dari 2 Ton Sampah. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/tanjungpinang/daerah/990463/wcd-tanjungpinang-kumpulkan-lebih-dari-2-ton-sampah>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman (2011).
- Wastiti, A., Purnaweni, H., Rahman, A. Z., Direktorat, A., Cipta, J., & Pekerjaan, K. K. (2018). Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).